

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menata daerahnya sendiri sudah diterapkan di Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sehingga tidak terjadi *fraud*. Pemerintah memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menyediakan pelayanan yang terbaik, maksimal, dan berkualitas kepada masyarakatnya, namun terkadang masih tidak terwujud. Kualitas pelayanan publik dan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi menurun. Bahkan kehadiran korupsi di sektor publik tentu saja mengakibatkan ketidakkondusifan lingkungan kerja dan sangat merugikan.

Auditor internal memiliki peran yang penting dalam suatu pemerintahan. Auditor internal bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan serta memberikan saran penanggulangan suatu hal yang perlu diperbaiki (Boynton et al., 2003). Auditor internal harus independen, memiliki kualifikasi yang baik secara individu maupun kelompok, dan selalu mematuhi kode etik serta standar yang berlaku. Gamar et al. (2015) menyatakan bahwa suatu organisasi yang memiliki fungsi audit internal efektif lebih mampu untuk mendeteksi, mencegah, dan mengurangi berbagai kemungkinan terjadinya kecurangan. Auditor internal yang kompeten akan dengan cepat mendeteksi kemudian menginformasikan kepada manajemen (Coram et al., 2006). Pemerintah memiliki auditor internal untuk membantu melakukan evaluasi dan perbaikan dari program yang telah dilakukan. Inspektorat merupakan auditor internal pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, inspektorat adalah pengawas dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki berbagai fungsi. Salah satunya adalah melakukan pengawasan internal terhadap kinerja dan

keuangan. Inspektorat melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya korupsi. Inspektorat wajib mengetahui terlebih dahulu permasalahan ekonomi daerahnya. Sebagai lembaga pengendalian internal pemerintah, inspektorat harus dapat mendeteksi dan mengidentifikasi tanda-tanda penyimpangan sebelum kecurangan terjadi sehingga penyimpangan dapat dicegah terjadinya (Russel & Regel, 1996).

Kecurangan yakni upaya yang disengaja untuk merampas milik orang lain (Eliza, 2015). IIA dalam Karyono (2013) mengungkapkan bahwasanya kecurangan merupakan tindakan yang tak diizinkan serta melanggar hukum kecurangan terdiri dari berbagai bentuk kejahatan ataupun tindakan kriminal, termasuk pencurian, penyalahgunaan properti, penyalagunaan informasi, penyalahgunaan tugas, menyembunyian fakta, pemalsuan fakta, dan korupsi. Korupsi merupakan jenis *fraud* yang sering terjadi (Wilopo, 2006).

Kasus korupsi merupakan salah satu problematika terbesar bagi Indonesia karena makin marak terjadi. Berlandaskan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018, semakin rendah nilai yang diberikan maka berarti negara tersebut memiliki banyak kasus korupsi, begitu pun sebaliknya. Indonesia mendapatkan skor 38 dari skala 0-100 dan menempati urutan ke-89 dari 180 negara.

Korupsi yang merajalela menghambat pembangunan daerah. Hal ini disebabkan pengendalian intern tidak berjalan secara efektif. Seharusnya inspektorat daerah yang paling dekat dengan sumber permasalahan, yang dapat meminimalisir atau memitigasi penyimpangan di daerah. Berdasarkan segi struktur kelembagaan, APIP harus cukup efisien dalam menjalankan tugas pengawasannya, karena didukung oleh struktur organisasi yang terstandarisasi. Namun yang menjadi pemikiran mengapa pengendalian internal untuk mendukung pengendalian secara keseluruhan tidak optimal karena masih banyak kasus korupsi di Indonesia dan beberapa pengelola OTT daerah.

Kasus korupsi terkini terjadi di Kabupaten Banyumas yang merugikan negara hingga Rp14 miliar. Tipikor Kejaksaan Negeri Purwokerto telah menahan Camat nonaktif Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas berinisial PJT. Tersangka ditahan atas dugaan penyalahgunaan dana eks Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

Kasus korupsi terkini lainnya yang merugikan negara terjadi pula di Kabupaten Purbalingga. Kejaksaan Negeri Purbalingga telah menahan tersangka bernama Muklisi, Kepala Desa Sindang, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga yang telah mengorupsi dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sindang tahun 2020 dan 2021. Total kerugian negara akibat kasus korupsi ini mencapai Rp1 miliar. Tersangka secara sepihak mengelola APBD tanpa ada transparansi dari pengelolaannya.

Korupsi yang terjadi di Kabupaten Banyumas terjadi di tingkat Kecamatan dan korupsi yang terjadi di Kabupaten Purbalingga terjadi di tingkat desa. Korupsi terjadi di tingkatan kecil dalam pemerintahan. Namun, kerugian negara dari korupsi yang terjadi di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga sangat besar. Maraknya kasus korupsi dalam beberapa tahun terakhir yang terjadi khususnya di pemerintah daerah adalah salah satu indikasi bahwa terjadi kegagalan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam mengenai faktor – faktor yang dapat memengaruhi auditor internal pemerintah dalam mendeteksi *fraud*.

Penilaian dari auditor internal pemerintah dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya *fraud* tentu dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Berdasarkan teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958) terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada faktor internal. Faktor internal yang ingin penulis teliti pengaruhnya terhadap pendeteksian *fraud* adalah skeptisisme profesional, independensi, dan objektivitas.

Penelitian mengenai kemampuan auditor mendeteksi *fraud* dengan variabel skeptisisme profesional telah dilakukan oleh Anto et al. (2020); Septiawan & Fadjarenie (2023); Solichin et al. (2021); Susilawati et al. (2022). Begitu pula dengan variabel independensi dilakukan oleh Anto et al. (2020); Bimantara & Ngumar (2018). Penelitian serupa dengan variabel objektivitas telah dilakukan oleh Bimantara & Ngumar (2018). Namun, penelitian dengan variabel ini masih jarang

dilakukan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan variabel – variabel dari penelitian terdahulu dan menambahkan variabel objektivitas yang masih jarang dilakukan dengan objek yang berbeda yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.

Berlandaskan fenomena yang sudah dipaparkan perlu dilakukannya penelitian tentang faktor apa saja yang dapat memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk melengkapi penelitian terdahulu dan mengkaji ulang dengan menggabungkan beberapa variabel independen dari penelitian terdahulu ke dalam variabel independen penelitian ini. Maka dari itu, penulis melaksanakan penelitiannya tentang: **“Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, dan Objektivitas Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi *Fraud* (Studi Empiris Pada Inspektorat di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)”**

1.2. Rumusan Masalah

Korupsi yang merajalela menghambat pembangunan daerah. Maraknya kasus korupsi dalam beberapa tahun terakhir yang terjadi khususnya di pemerintah daerah adalah salah satu indikasi bahwa terjadi kegagalan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat daerah yang paling dekat dengan sumber permasalahan seharusnya dapat meminimalkan atau mencegah terjadinya penyimpangan di daerah. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam mengenai faktor – faktor yang dapat memengaruhi auditor internal pemerintah dalam mendeteksi *fraud*. Berlandaskan uraian yang sudah dikemukakan sebelumnya, disusunlah suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*?
3. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan masalah penelitian, ditentukanlah tujuan penelitian yakni guna membuktikan secara empiris pengaruh skeptisisme profesional, independensi, dan objektivitas terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yakni:

- a. Bagi Inspektorat Daerah
Dapat menjadi masukan dan motivasi bagi inspektorat untuk lebih meningkatkan kinerja dan efektivitas perannya sebagai auditor internal pemerintah dalam mendeteksi *fraud* demi mencegah terjadinya korupsi di daerah.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dapat berkontribusi dalam pengembangan penelitian mengenai kemampuan auditor mendeteksi *fraud*.

1.5. Sistematika Penelitian

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai ikhtisar dan gambaran umum tentang masalah yang ditemukan. Bab I pendahuluan ini terdiri dari latar belakang dari permasalahan yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang akan dilakukan.

2. BAB II KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka terhadap teori-teori utama yang digunakan dalam analisis data yang ditemukan dan selanjutnya mendefinisikan hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini. Bab II kajian literatur dan pengembangan hipotesis ini terdiri dari kajian literatur, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran tentang metode penelitian sebagai dasar untuk menganalisis data yang ditemukan. Bab III metode penelitian terdiri dari jenis dan objek penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian, model pengujian statistik, dan metode analisis.

4. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan temuan-temuan penelitian terkait dengan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya dan penanganannya. Selain itu juga disajikan data dan analisis terkait masalah tersebut.

5. **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan tentang hasil analisis data, keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini, dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan.

